

## PELATIHAN MANAJEMEN ASET DALAM MENINGKATKAN AKUNTABILITAS DARI TATA KELOLA ASET PADA KELURAHAN SUDIMARA CILEDUG - TANGERANG SELATAN

Holiawati <sup>1</sup>, Endang Ruhayat <sup>2</sup>, Firman Tatariyanto <sup>3</sup>  
[dosen00011@unpam.ac.id](mailto:dosen00011@unpam.ac.id)

### ABSTRAK

Kegiatan PKM dilaksanakan dengan menggunakan metode pemaparan materi dan diskusi. Pemaparan materi dilakukan oleh Tim Dosen Magister Manajemen Universitas Pamulang. Pelatihan dan pendampingan dilaksanakan dalam kerangka meningkatkan pemahaman dan kompetensi pegawai kelurahan dan Ketua RW sebagai bagian dari lembaga kemasyarakatan terkait manajemen aset untuk mewujudkan akuntabilitas dari tata kelola aset pada kelurahan Sudimara. Sumber daya manusia yang memahami dan memiliki kompetensi dalam implementasi manajemen aset didukung oleh sistem pengendalian internal yang baik akan meningkatkan akuntabilitas dari pemerintah maupun peningkatan layanan kesejahteraan masyarakat.

Kata kunci: Akuntabilitas, Manajemen Aset

### ABSTRACT

*PKM activities are carried out using the method of presentation of material and discussion. The presentation of the material was carried out by the Pamulang University Master of Management Lecturer Team. Training and mentoring is carried out within the framework of increasing the understanding and competence of village officials and RW heads as part of social institutions related to asset management to realize accountability for asset management in the Sudimara village. Human resources who understand and have competency in implementing asset management supported by a good internal control system will increase accountability from the government and improve community welfare services.*

*Keywords: Accountability, Asset Management*

### A. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan pada tingkat daerah sampai dengan tingkat terendah di kelurahan yang efektif dan efisien akan membutuhkan sarana dan prasarana berupa aset yang memadai yang tertata kelola dengan baik. Pengelolaan aset tersebut sejalan dengan proses untuk mengoptimalkan dampak atas anggaran, kinerja maupun potensi risiko inefisiensi dan pencatatan serta pengakuan dari aset fisik yang dikelola oleh pemerintah. Oleh karena itu, manajemen aset Pemerintah Daerah merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

(LKPD), temuan audit atas berbagai permasalahan terkait pengelolaan aset yang sering diungkapkan oleh auditor antara lain adalah nilai aset utamanya aset tetap yang disajikan dalam neraca belum didukung dengan pencatatan (inventarisasi) yang memadai; saldo aset tetap tidak dapat ditelusur; aset tetap tidak diketahui keberadaannya; aset tetap dikuasai pihak lain; dan aset tetap tidak didukung dengan bukti kepemilikan (Ditjen Perbendaharaan, 2022).

Selain itu, kelemahan lain yang sangat mungkin terjadi terkait aset tetap adalah permasalahan dalam hal penyusutan. Penyusutan sendiri menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset

yang bersangkutan. Nilai penyusutan ini nantinya akan diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca sekaligus sebagai beban penyusutan dalam 5 (lima) laporan operasional. Dengan beragamnya data pencatatan aset maka permasalahan pencatatan atau penatausahaan pembukuan aset merupakan pekerjaan yang sangat membutuhkan konsentrasi pemerintah daerah karena golongan aset yang dipersyaratkan harus sesuai SAP.

Dalam rangka mendapatkan keyakinan yang memadai atas LKPD, BPK juga melakukan pemeriksaan dengan mendasarkan pengujian atas sistem pengendalian internal yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Hasil yang cukup mengejutkan pada tingkat nasional dengan ditemukan sebesar 46% permasalahan kelemahan penerapan sistem pengendalian internal pemerintah adalah pada implementasi manajemen aset. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa kualitas informasi manajemen aset, khususnya yang disajikan dalam LKPD belum sepenuhnya memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) utamanya dalam PSAP 07 dan PSAP 08. (BPK pada IHPS 1-2021).

Berdasarkan hal tersebut, manajemen aset daerah oleh jajaran Pemerintah Daerah menjadi sebuah keniscayaan. Pemerintah daerah harus mampu mendesign tata kelola yang baik dengan mendasarkan berbagai aspek manajemen aset mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaannya, pemanfaatan pemeliharaan dan pengamanan hingga pengawasannya agar aset daerah mampu memberikan kontribusi optimal bagi pemerintah daerah yang bersangkutan. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menjaga akuntabilitas dengan menyusun LKPD setiap tahun menjadi sebuah pertanggungjawaban kepada *stakeholder*. (Yusuf, 2015).

Permasalahan dan tantangan terkait manajemen aset di tingkat pemerintah daerah juga tercermin dan dihadapi oleh lembaga kemasyarakatan ini. Inventarisasi yaitu kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan aset menjadi salah satu tantangan dalam upaya mewujudkan tertib administrasi dan tertib fisik pelaksanaan manajemen aset oleh pegawai kelurahan dan ketua RW. Kegiatan inventarisasi ini dimaksudkan untuk mengetahui jumlah, nilai dan kondisi aset yang sebenarnya dengan tujuan tersedianya data semua aset secara baik.

Berdasarkan hal tersebut, pengabdian merasa bertanggung jawab terhadap perbaikan kondisi tersebut dengan melakukan PKM dengan melaksanakan kegiatan pelatihan untuk berbagi pengetahuan tentang pengelolaan /manajemen Aset yang baik dalam mendukung tata kelola pemerintah yang baik terhadap aset pada tingkat terkecil dari pemerintah daerah yaitu lembaga kemasyarakatan. Program pelatihan manajemen aset ini akan lebih difokuskan pada pengembangan pemahaman para pegawai kelurahan dan ketua RW sebagai pengelola aset dalam mengelola aset. Pelatihan ini akan diselenggarakan dilingkungan Kelurahan Sudimara secara berkelanjutan pada pegawai kelurahan dan ketua RW dan jajarannya sehingga aset sehingga menjadi informasi yang lebih informatif yang bersifat transparan dan akuntabel.

Melalui latar belakang yang telah dijelaskan, maka dapat dirumuskan permasalahannya adalah peningkatan akuntabilitas manajemen aset dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien melalui peningkatan pemahaman dan kompetensi pengelola aset pada tingkat kelurahan Sudimara.

Adapun tujuan dari pengabdian kepada masyarakat adalah untuk memberikan pemahaman terkait dengan manajemen aset dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dari tata kelola aset di lingkungan kelurahan Sudimara.

Adapun manfaat pelatihan ini bagi pegawai kelurahan dan Ketua RW dilingkungan Kelurahan Sudimara yaitu:

1. Memberikan pelatihan dan pemahaman manajemen aset yang sesuai dan layak berdasarkan peraturan dan standar pencatatan yang berlaku.
2. Memberikan pemahaman tata kelola atas aset pada pemerintah daerah.
3. Memberikan pemahaman atas implementasi manajemen aset dalam proses perencanaan, mendapatkan, menilai, mengoperasikan, memelihara, membaharukan dan menghapus hingga mengalihkan aset secara efektif dan efisien.
4. Meningkatkan pemahaman dalam penerapan manajemen aset untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi kepada *stakeholder* di lingkungan Kelurahan Sudimara.

Manajemen aset dalam sektor publik baik pada tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah merupakan alat penting dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien (Hanis et al., 2011). Hal ini berkaitan dengan tingkat penyediaan tingkat layanan yang diterima *stakeholders* dimasa kini dan masa depan (Ngwira et al., 2012).

Akuntabilitas merupakan suatu keadaan yang dapat dipertanggungjawabkan, bertanggungjawab, dan akuntabel (Waluyo, 2007). Akuntabilitas merupakan salah satu unsur pokok perwujudan *good governance*. Setiap instansi pemerintah diminta untuk melaporkan hasil dari program yang telah dilaksanakan sehingga masyarakat dapat menilai apakah pemerintah telah bekerja dengan ekonomis, efisien dan efektif. Akuntabilitas kinerja juga merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi.

## B. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Kemampuan atau kompetensi dalam menjalankan manajemen aset secara terkait proses pengelolaan aset harus dimiliki oleh individu dan organisasi yang dilakukan secara efektif dan efisien agar tujuan mendukung akuntabilitas pemerintah yang telah ditentukan dapat tercapai. Kegiatan pengelolaan aset mencakup proses merencanakan, mendapatkan, menilai, mengoperasikan, memelihara, membaharukan, dan menghapuskan, hingga mengalihkan aset secara efektif dan efisien, termasuk inventarisasi dan legal audit.

Sebagai lembaga kemasyarakatan yang memiliki tugas membantu kinerja Pemerintah Daerah, kemampuan atau kompetensi pengelolaan terhadap aset daerah bagi pegawai kelurahan dan ketua RW dan seluruh jajarannya sebagai bagian dari tugas dan fungsi menjadi sebuah keniscayaan. Berdasarkan hal tersebut, kegiatan pelatihan dalam pengelolaan aset terutama dalam kegiatan inventarisasi melalui pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan aset diharapkan akan dapat menyusun data semua aset secara baik dalam upaya mewujudkan tertib administrasi dan tertib fisik serta mempermudah pelaksanaan pengelolaan aset.

Sejalan dengan hal tersebut pelatihan ini tidak hanya menekankan aspek pengetahuan melainkan pembelajaran dalam membantu memecahkan persoalan operasional dan

memberikan kemampuan yang lebih tinggi dalam melaksanakan tugas dalam bekerja. Adapun tahapan yang dilakukan yaitu fase pra-lapangan, fase lapangan dan fase paska lapangan akan dijelaskan dalam bagian selanjutnya.

Metode pelaksanaan pengabdian masyarakat yang dilakukan dibagi menjadi tiga tahapan yaitu pra lapangan, lapangan dan pasca lapangan dengan penjelasan sebagai berikut:

- Tahap pra-lapangan meliputi tahapan persiapan, survei pendahuluan kepada lembaga kemasyarakatan di lingkungan Kelurahan Sudimara untuk mengetahui kebutuhan pelatihan dan kondisi serta tingkat pengetahuan terkait pengelolaan aset.
- Tahap lapangan merupakan tahapan inti dalam program pengabdian masyarakat yaitu penyampaian materi untuk memberikan pemahaman terkait memberikan pemahaman terkait dengan manajemen aset yang sesuai dan layak berdasarkan peraturan dan standar pencatatan yang berlaku. Memberikan pemahaman terkait dengan tata kelola yang baik. Memberikan pemahaman terkait dengan pencatatan, inventarisasi dan pelaporan aset dengan akurat dan dapat dijadikan bahan pertimbangan, dan bagaimana implementasi dari pengembangan sistem pengelolaan aset yang tepat dan sesuai prosedur.
- Tahap paska lapangan merupakan tahapan pendampingan dan evaluasi atas program pelatihan yang telah dilaksanakan.

Pelaksanaan PKM ini ditujukan khususnya kepada pegawai Kelurahan dan Ketua RW sebagai bagian dari Lembaga Kemasyarakatan di lingkungan Kelurahan Sudimara yang mendukung terwujudnya akuntabilitas dalam manajemen aset Pemerintah Daerah Tangerang Selatan. Program pelatihan dan peraturan serta standar pencatatan dalam meningkatkan pengetahuan dan kompetensi dalam tata kelola aset dipersiapkan oleh Tim Dosen Program Studi Magister Akuntansi Universitas Pamulang. Partisipasi mitra dalam pelaksanaan program PKM ini sangat kooperatif dengan memberikan ijin kepada tim untuk melaksanakan pengabdian memberikan keterangan baik berupa informasi atau data-data yang dibutuhkan sampai rencana pelaksanaan berupa kegiatan pelatihan/pendampingan nantinya.

Kegiatan PKM dilaksanakan dengan menggunakan metode pemaparan materi dan diskusi. Pemaparan materi dilakukan untuk

memberikan edukasi terkait dengan hal sebagai berikut:

- a. Manajemen aset yang sesuai dan layak berdasarkan peraturan dan standar pencatatan yang berlaku.
- b. Tata Kelola atas aset pada pemerintah daerah.
- c. Pencatatan, inventarisasi dan pelaporan aset dengan akurat dan dapat dijadikan bahan pertimbangan, dan
- d. Implementasi dari pengembangan sistem pengelolaan aset yang tepat dan sesuai prosedur.

Evaluasi kegiatan dilakukan setelah kegiatan pelatihan dan pendampingan kepada pegawai Kelurahan dan Ketua RW sebagai bagian dari Lembaga Kemasyarakatan di lingkungan Kelurahan Sudimara terkait dengan manajemen aset dalam meningkatkan akuntabilitas dari tata kelola aset oleh Tim Dosen Program Studi Magister Akuntansi Universitas Pamulang

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sesuai dengan tahapan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, berikut adalah prosedur kerja untuk melaksanakan program PKM

Tahap persiapan yang dilakukan meliputi :

- 1) Survei awal. Pada tahap ini dilakukan survei lokasi pelaksanaan di Kelurahan Sudimara.
- 2) Observasi. Setelah survei maka ditentukan waktu dan jadwal pelaksanaan serta sasaran peserta kegiatan.
- 3) Rapat Koordinasi Tim. Pada tahap ini rapat mengenai pembagian tugas, membuat jadwal pelaksanaan, mulai dari persiapan sampai detail pelaksanaan pelatihan yang akan dilakukan.

Tahap pelaksanaan yang dilakukan meliputi :

- a) Sosialisasi Program. Pada tahap awal pelaksanaan dilakukan sosialisasi program kepada calon mitra sebagai pengelola aset
- b) Pelatihan/Pendampingan. Sesuai dengan langkah selanjutnya adalah memberikan pelatihan/pendampingan manajemen aset dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman serta kompetensi pegawai kelurahan dan ketua RW di lingkungan Kelurahan Sudimara. Pelatihan yang diberikan adalah sebagai berikut:
  - 1) Memberikan pelatihan dan pemahaman manajemen aset yang sesuai dan layak

berdasarkan peraturan dan standar pencatatan yang berlaku.

- 2) Memberikan pemahaman tata lola atas aset pada pemerintah daerah.
  - 3) Memberikan pelatihan pencatatan, inventarisasi dan pelaporan aset dengan akurat dan dapat dijadikan bahan pertimbangan, dan
  - 4) Memberikan pendampingan implementasi dari pengembangan sistem pengelolaan aset yang tepat dan sesuai prosedur.
- c) Tahap pendampingan berkelanjutan dan evaluasi merupakan pendampingan secara berkelanjutan atas implementasi manajemen aset yang dilakukan oleh Kelurahan Sudimara dan penilaian setelah rangkaian kegiatan dilakukan oleh pelaksana sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Evaluasi ini bisa berupa perbaikan atau saran untuk pelaksanaan kegiatan lebih baik lagi dan kelanjutan menjadi binaan kampus.

Manajemen aset dalam sektor publik baik pada tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah merupakan alat penting dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien (Hanis et al., 2011). Aset tidak hanya untuk kepentingan meningkatkan pendapatan, akan tetapi juga untuk kepentingan yang lebih luas seperti pembangunan, sarana pendidikan dan sarana sosial lainnya untuk menunjang pelayanan publik, dan lain-lain. Pengelolaan dan manajemen aset yang baik dilakukan antara lain mendasarkan kepada berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07. Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Lembaga kemasyarakatan di tingkat kelurahan yaitu Rukun Warga menjadi bagian dari Pemerintah Daerah dalam mewujudkan berbagai program pemerintahan dalam rangka memperkuat dan memajukan bangsa. Oleh karena itu, lembaga kemasyarakatan juga menjadi bagian untuk mendukung tercapainya akuntabilitas publik pemerintah daerah. Sehingga sebagai lembaga yang memiliki tugas dan fungsi membantu kinerja Pemerintah, tentunya perlu pegawai kelurahan dan ketua RW

dan seluruh jajarannya memiliki pemahaman serta kompetensi untuk dapat mampu melakukan pengelolaan terhadap aset daerah mereka masing-masing.

Program pengabdian masyarakat ini bermitra dengan Pegawai kelurahan dan Ketua RW pada lingkungan Kelurahan Sudimara. Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan/atau sharing pengetahuan kepada pegawai kelurahan dan ketua RW terkait dengan pentingnya manajemen aset. Pemahaman terkait dengan manajemen aset menjadi aspek penting karena aset harus dikelola dan kelola dengan baik dan benar, sehingga keberadaannya dapat membantu pelaksanaan jalannya kinerja dalam pelayanan dan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah.

Permasalahan yang sering muncul dalam manajemen aset pada pegawai kelurahan dan ketua RW adalah masih belum pahamnya para ketua RW dan pengurus yaitu terkait inventarisasi yaitu kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan aset. Kegiatan inventarisasi dimaksudkan untuk mengetahui jumlah, nilai dan kondisi aset yang sebenarnya dengan tujuan tersedianya data semua aset secara baik dalam upaya mewujudkan tertib administrasi dan tertib fisik serta Mempermudah pelaksanaan pengelolaan aset.

Merujuk pada kondisi tersebut maka pengabdian merasa bertanggung jawab terhadap perbaikan kondisi tersebut dengan melakukan kegiatan pelatihan yang dimaksudkan untuk berbagi pengetahuan tentang pengelolaan /manajemen Aset yang baik, dengan harapan dapat memberikan masukan untuk memecahkan masalah tata kelola yang baik terhadap aset. Program pelatihan pengelolaan manajemen aset ini akan lebih difokuskan pada pengembangan kemampuan para pegawai kelurahan dan ketua RW dalam mengelola aset.

Program pelatihan pengelolaan aset di lingkungan Kelurahan Sudimara difokuskan pada pemahaman atas manajemen aset pada level pegawai kelurahan dan ketua RW dan jajarannya dan standar pengelolaan aset sehingga menjadi informasi yang lebih informatif yang bersifat transparan dan akuntabel.

Dan Adapun manfaat edukasi ini bagi Pegawai kelurahan dan ketua RW dan Jajarnya pada Kelurahan Sudimara adalah

a) Memberikan pelatihan dan pemahaman manajemen aset yang sesuai dan layak

berdasarkan peraturan dan standar pencatatan yang berlaku.

- b) Memberikan pemahaman tata lola atas aset pada pemerintah daerah.
- c) Memberikan pelatihan pencatatan, inventarisasi dan pelaporan aset dengan akurat dan dapat dijadikan bahan pertimbangan, dan
- d) Memberikan pendampingan implementasi dari pengembangan sistem pengelolaan aset yang tepat dan sesuai prosedur.

## **D. KESIMPULAN DAN SARAN**

Penyelenggaraan pemerintahan pada tingkat daerah sampai dengan tingkat terendah di kelurahan yang efektif dan efisien akan membutuhkan sarana dan prasarana berupa aset yang memadai yang tertata kelola dengan baik. Oleh karena itu, pemerintah harus mampu mendesign tata kelola yang baik dengan mendasarkan berbagai aspek manajemen aset mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaannya, pemanfaatan pemeliharaan dan pengamanan hingga pengawasannya agar aset daerah mampu memberikan kontribusi optimal bagi pemerintah daerah yang bersangkutan.

Sumber daya manusia pengelola aset yang kompeten dalam mengimplementasikan manajemen aset yang baik dan yang didukung oleh sistem pengendalian internal yang handal diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas serta membantu pelaksanaan jalannya kinerja dalam pelayanan dan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan hal tersebut, program pelatihan manajemen aset kepada lembaga kemasyarakatan di lingkungan Kelurahan Sudimara menjadi sebuah keniscayaan dalam mendukung keberlanjutan dan konsep tujuan akuntabilitas pembangunan berkelanjutan.

Peningkatan akuntabilitas manajemen sektor publik menjadi memerlukan peran aktif dari seluruh lapisan masyarakat. Penguatan dan pemahaman manajemen aset bagi lembaga kemasyarakatan masih memerlukan keberlanjutan untuk mencapai akuntabilitas birokrasi publik.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Hanis, M. H., Trigunaryah, B., & Susilawati, C. (2011). The Application of Public Asset Management in Indonesian Local Government: A Case Study in South Sulawesi Province. *Journal of Corporate Real Estate*, 1 (1), 36–47.

Mardiasmo. (2006). Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik : Suatu Sarana Good Governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 2: 1. (1-17).

Mahmudin SW, Eka. (2017). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kualitas Pelaporan Keuangan dan Dampaknya Terhadap Akuntabilitas Keuangan. *Scientium* Volume 6. No.1 Juni 2017:11-26.

Ngwira, M. M., Parsa, A., & Manase, D. (2012). Effectiveness of Property Asset Management in Scottish Councils. *Journal of Corporate Real Estate*, 14(2), 105–120.

Republik Indonesia. BPK RI. 2018 Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2017.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Setiyawati, Hari. (2013). The effect of Internal Accountant's Competence, Manager's Coomitment to Organization and the Implementation of The Internal Control System on the Quality of Financial Reporting. *International Journal of Business and Management Invention* Volume 2 Issue 11. November. 2013. PP.19-27.

Shafritz, J. M., Russell, E. W., Borick, C. P., & Hyde, A. C. (2017). *Introducing Public Administration (9th ed.)*. Routledge

Siregar, D. D. (2004). Manajemen Aset Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan secara Nasional dalam Konteks Kepala Daerah sebagai CEO's pada Era Globalisasi dan Otonomi Daerah. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (2021). Optimalisasi Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Tetap dalam Rangka Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Semarang.

Yusuf, M. (2015). Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik. Jakarta: Salemba Empat.

# *Pro Bono*

*Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat | Volume 3, Nomor 1 Februari 2023*



# Pro Bono

*Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat | Volume 3, Nomor 1 Februari 2023*

